



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023



**KECAMATAN BATURETNO  
KABUPATEN WONOGIRI**

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN COVER .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
DAFTAR GAMBAR .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Kedudukan, Tugas Pokok & Fungsi .....	2
1.3 Aspek Strategis Organisasi & Permasalahan Utama .....	3
1.4 Landasan Hukum.....	9
1.5 Sistematika .....	10
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>	
2 Perencanaan Kinerja	12
2.1 Rencana Strategis	12
2.2 Perencana Kinerja	20
2.3 Perjanjian Kinerja	21
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	24
3.2 Analisis Capaian Kinerja	25
3.3 Realisasi Anggaran	47
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
4.1 Kesimpulan	49
4.2 Rekomendasi	50
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.3	: Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja.....	19
Tabel 2.1.4	: Tujuan Sasaran Tahun 2023 .....	21
Tabel 2.1	: Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Kecamatan Baturetno .....	22
Tabel 3.2.1	: Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini .....	25
Tabel 3.2.2	: Tabel Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu .....	34
Tabel 3.2.3	: Tabel Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah.....	34
Tabel 3.2.4	: Tabel Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional/Provinsi/Kab.....	40
Tabel 3.2.5	: Tabel Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan/ Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.....	41
Tabel 3.2.6	: Efisien Dan Efektifitas Kinerja Kecamatan Baturetno.....	43
Tabel 3.3.1	: Capaian Anggaran Program dan Kegiatan Kecamatan Baturetno.....	47

## DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1 :	Peta Wilayah Kecamatan Baturetno .....	1
Gambar 1.2 :	Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan Baturetno	5

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Kecamatan Baturetno Kabupaten Wonogiri Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Wonogiri, bahwa Kecamatan Baturetno mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa output maupun outcome.

Disisi lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Baturetno NOMOR 74 Tahun 2021.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Kecamatan Baturetno melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2023, Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan Rencana Strategis 2021-2026 serta Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 yang telah ditetapkan.

Wonogiri, 2 Januari 2024  
CAMAT BATURETNO  
  
Drs. EKO NUR HARYONO, MM  
Pembina Tk.I  
NIP. 19670405 198903 1 009

# BAB I

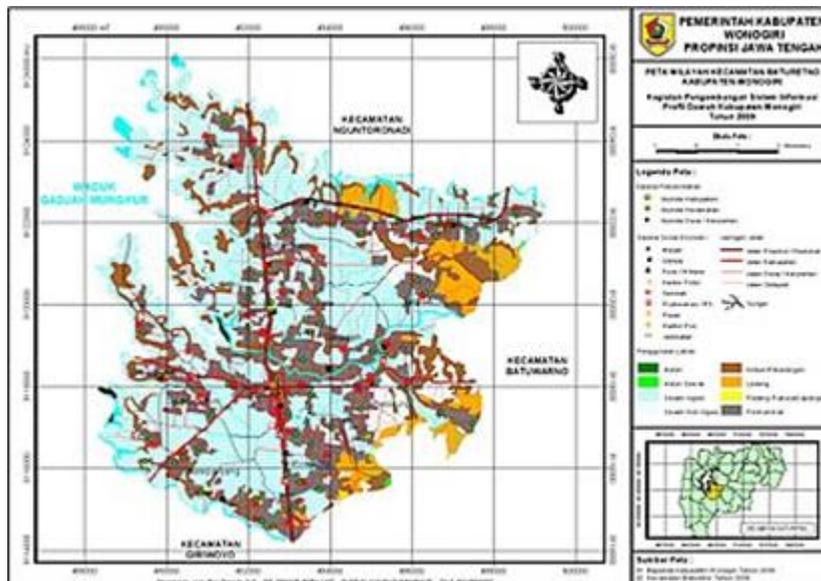
## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Berdasarkan data BPS Kabupaten Wonogiri (2020), secara geografis, Kecamatan Baturetno memiliki luas wilayah 5.107 Ha dengan letak dari permukaan laut sekitar 44 m dengan curah hujan rata-rata 2000-3000 ml/tahun. Luas Wilayah Kecamatan Baturetno. 5.1075 Ha terdiri dari Tanah Sawah 1.727 Ha dan Tanah Tegalan 1.277,9 Ha Tanah yang di gunakan bangunan atau pekarangan 1.860,5 Ha Hutan Negara 696,6 dan Tanah lain-lain 696,6 Ha. Jumlah penduduk Kecamatan Baturetno menurut data BPS tahun 2020 sejumlah 47.711 jiwa dengan rata rata pertumbuhan 2016-2019 sebesar 0,24%. Jarak dari Pusat Ibu Kota Kabupaten Wonogiri ± 38 Km yang di hubungkan oleh jalan Kabupaten dengan batas-batas Wilayah Kecamatan sebagai berikut :

1. Sebelah Barat berbatasan dengan Eromoko.
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Batuwarno dan Tirtomoyo
3. Sebelah Utara berbatasan dengan Nguntoronadi
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Giriwoyo

Gambar 1.1 Peta Wilayah Kecamatan Baturetno



#### A. Sumber daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah faktor sentral dalam suatu institusi/organisasi. Apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh manusia. Sehingga manusia merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan institusi. Kondisi institusi akan sangat dipengaruhi dan tergantung pada kualitas serta kemampuan kompetitif sumber daya manusia yang dimilikinya.

Asset utama yang dimiliki oleh Kecamatan Baturetno dalam menjalankan

tugas pokok dan fungsinya adalah Sumber Daya Manusia. Jumlah ASN Kecamatan Baturetno pada tahun 2023 sebanyak 14 (Empat Belas) orang.

Jika dilihat dari komposisi golongan, 33,33% atau 4 orang memiliki Golongan IV, kemudian 33,33% atau 4 orang memiliki Golongan III, selanjutnya 33,33% atau 4 orang memiliki golongan II.

Tabel 1.1  
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

Eselon	BERDASAR GOLONGAN				
	IV	III	II	I	JML
ESELON III	2				2
ESELON IV	2	4			6
STAF			4		4
JUMLAH	4	4	4		
% DARI JML PEG	33,33	33,33	33,33		

Sedangkan apabila dilihat dari komposisi pendidikan, 41,66% atau 5 orang berpendidikan S2, kemudian 25% atau 3 orang berpendidikan S1, 8,3% atau 1 orang berpendidikan D3, dan 26 % atau 3 orang berpendidikan SMA.

Tabel 1.2  
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Eselon	BERDASAR PENDIDIKAN				
	S2	S1	D3	SMA	JML
ESELON III	2				2
ESELON IV	3	3			6
STAF			1	3	4
JUMLAH	5	3	1	3	
% DARI JML PEG	41,66	25	8,3	26	

## 1.2 Kedudukan, Tugas Pokok & Fungsi

Kecamatan Baturetno merupakan salah satu Perangkat Daerah (PD) di Kabupaten Wonogiri yang mempunyai wilayah kerja di Kecamatan sebagai unsur pelaksana bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Kecamatan Baturetno dipimpin oleh Camat yang berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan Baturetno mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati dan tugas pemerintahan lainnya. Tugas pokok dan fungsi Kecamatan Baturetno mengacu pada Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 94 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan.

Camat mempunyai tugas untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya, Camat mempunyai fungsi:

1. Pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan

- ketertiban umum;
4. Pengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
  5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
  6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
  7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
  8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan; dan
  9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 1.3 Aspek Strategis & Permasalahan Utama

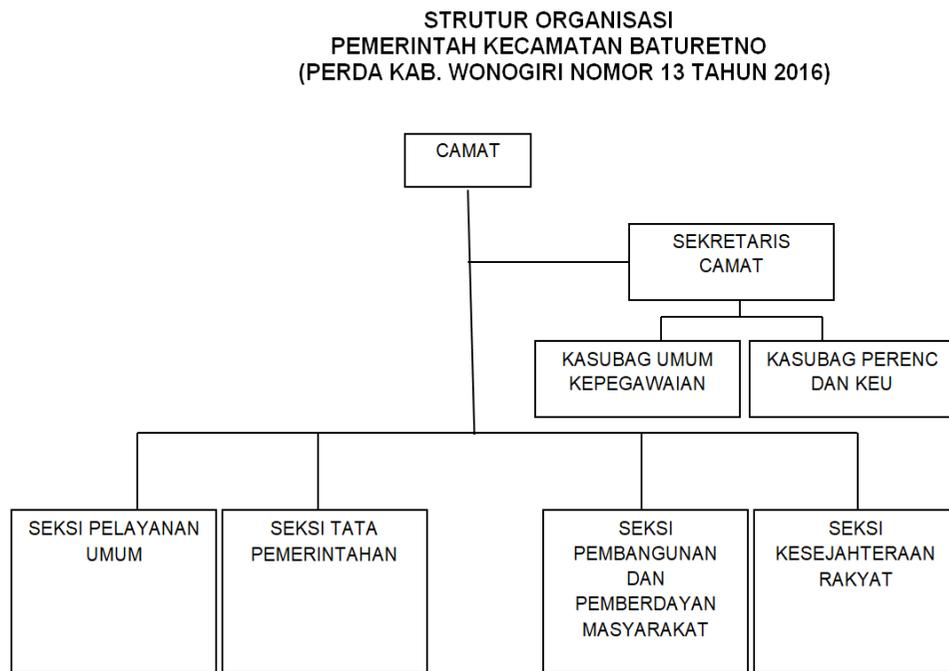
Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Baturetno selama 5 (lima) tahun yang lalu, mencermati tantangan dan peluang pelayanan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Baturetno, maka beberapa permasalahan berdasarkan tugas dan pelayanan yang berkembang dan harus dihadapi Kecamatan Baturetno 5 (lima) tahun ke depan antara lain:

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Penyusunan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang belum tepat waktu dan transparan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan;</li> <li>• Beragamnya tuntutan dan aspirasi masyarakat dengan berbagai kepentingan kadang-kadang menimbulkan pertentangan. Untuk itu segala aspirasi tersebut ditampung dan diperhatikan;</li> <li>• Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas;</li> <li>• Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran Kecamatan harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat</li> </ul>

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
2.	Pengelolaan administrasi keuangan, administrasi umum dan administrasi kepegawaian	Pengelolaan administrasi keuangan, administrasi umum dan administrasi kepegawaian yang belum tertib	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah staf yang kurang memadai baik dari sisi kualitas masih cukup rendah maupun sisi kuantitasnya yang semakin terbatas;</li> <li>• Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang kurang memadai dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di Kecamatan</li> </ul>
3.	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Pemberdayaan masyarakat Desa dan kelurahan yang belum merata	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurangnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa</li> <li>• Masih rendahnya kedisiplinan warga dan perangkat desa/kelurahan dalam administrasi pembayaran PBB</li> <li>• Masih adanya infrastruktur di kelurahan yang belum memadai.</li> <li>• Pemberdayaan masyarakat di kelurahan yang belum merata</li> <li>• Pentingnya penunjang pemerintahan kelurahan.</li> </ul>
4.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum	Kurangnya koordinasi urusan pemerintahan umum dengan pimpinan kecamatan maupun dengan desa / kelurahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurangnya pengetahuan perangkat Desa /Kelurahan tentang administrasi desa</li> <li>• Pentingnya koordinasi dan komunikasi Pimpinan Kecamatan</li> </ul>
5.	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan yang belum memuaskan	Pelayanan PATEN yang belum maksimal

## 1.2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Kecamatan Baturetno berdasarkan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 94 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan terdiri dari :



untuk menangani sebagian urusan otonomi dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa dan/atau Kelurahan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Camat mendapatkan sebagian pelimpahan kewenangan dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat, yang meliputi :

### 1.2.1 Aspek Perijinan

Pemberian Ijin pemasangan reklame papan merk toko yang menempel di areal toko dalam satu Kecamatan.

#### 2. Aspek Rekomendasi

- a. Rekomendasi, pencacatan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan lahan bebas jalan dan kali mati ;
- b. Rekomendasi ijin kursus / ketrampilan ;
- c. Rekomendasi dan pengawasan ijin pendaftaran LSM yang bergerak dalam bidang social, Organisasi Sosial/Panti, Pengumpulan Uang dilingkungan Kecamatan ;
- d. Rekomendasi pemberian Surat Keterangan domisili Kantor/Usaha Industri ;
- e. Rekomendasi pemberian ijin usaha ketenagalistrikan kepentingan sendiri yang berada diwilayah Kecamatan ;

- f. Rekomendasi pemberian ijin Usaha, pengawasan dan pelaporan tempat usaha pelatihan kerja ;
  - g. Rekomendasi ijin keramaian.
3. Aspek Penyelenggaraan
- a. Untuk menandatangani :
    - Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia antar Kecamatan dalam satu Kabupaten/Kota ;  
Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negera Indonesia antar Kecamatan dalam satu Kabupaten/Kota ;

1.2.2 Untuk menandatangani Legalisasi :

- Surat Keterangan Kelahiran untuk Warga Negara Indonesia pada Kelurahan yang bersangkutan ;
- Surat Keterangan Lahir Mati untuk Warga Negara Indonesia pada Kelurahan yang bersangkutan ;
- Surat Keterangan Kematian untuk Warga Negara Indonesia pada Kelurahan yang bersangkutan.
- Pendataan titik lampu penerangan jalan dan taman serta penataan dan pemasangan lampu-lampu di jalan dan taman lingkungan (*Kecuali Kota Kabupaten dan Kota Kecamatan*) ;
- Pendataan penggunaan alat pemadam kebakaran pada semua unit jenis bangunan (*Kecuali Bangunan Pemerintah*);
- Pembentukan satuan relawan kebakaran (SATKORLAK) di tiap Kecamatan ;
- Pendataan, penertiban, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian PKL ;
- Pengumpulan data tentang implementasi system pembiayaan kesehatan melalui JPKM ;
- Pelaksanaan penyuluhan program wajib belajar secara umum (*Kecuali penyuluhan yang bersifat teknis*);
- Pencatatan, pendataan, penyuluhan, monitoring dan pengawasan sector IKDK (Industri Kecil dan Dagang Kecil) non formal diluar tanah dan bangunan ;
- Pelaksanaan pencegahan atas pengambilan SDA tanpa ijin yang dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup ;
- Pelaksanaan monitoring dan inventarisasi terhadap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, tanah Negara bebas, dan tanah timbul di wilayah kerjanya ;
- Pendataan ketenagakerjaan ;
- Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan perlindungan masyarakat (LINMAS) di wilayah kerjanya ;

- Pengusulan penetapan nama-nama geografi ;
- Pengusulan penetapan batas wilayah Kecamatan dan batas wilayah antar kelurahan ;
- Pengusulan penetapan pemekaran RT/RW ;
- Pengusulan penetapan pemekaran Kelurahan ;
- Pengusulan penghapusan barang Kecamatan dan

## 1. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi bidang perencanaan, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian di lingkungan Kecamatan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi, antara lain :

- a. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan, rencana, program kegiatan, anggaran, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan di lingkungan Kecamatan;
- b. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Kecamatan ;
- c. Pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Kecamatan;
- d. Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kecamatan;
- e. Pengelolaan dan penatausahaan aset serta pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kecamatan;
- f. Pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Kecamatan; dan
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretariat dibantu oleh :

### 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan mengintegrasikan bahan perencanaan dan pelaporan, pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), pengelolaan dan penatausahaan keuangan serta pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kecamatan.

## **2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, pengelolaan aset, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip, pengelolaan informasi dan dokumentasi, penataan organisasi dan tata laksana, serta pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kecamatan.

## **3. Seksi Tata Pemerintahan**

Tugas Seksi Tata Pemerintahan adalah menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan koordinasi, evaluasi, pelaporan, pelaksanaan administrasi dinas serta pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan / atau Kelurahan bidang tata Pemerintahan yang meliputi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pengkoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

## **4. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat**

Tugas Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat adalah Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan koordinasi, evaluasi, pelaporan, pelaksanaan administrasi dinas serta pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat Desa dan /atau Kelurahan, pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.

## **5. Seksi Kesejahteraan Rakyat**

Tugas Seksi Kesejahteraan Rakyat adalah Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan koordinasi, evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dinas, serta pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Desa bidang Kesejahteraan Rakyat dan sosial yang meliputi pengkoordinasian pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan dan kebudayaan, kepemudaan dan olah raga, kesehatan, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sosial, tenaga kerja, pengkoordinasian pembinaan terhadap organisasi sosial kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat.

## 6. Seksi Pelayanan Umum

Tugas Seksi Pelayanan Umum adalah Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan koordinasi, evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi bidang pelayanan umum yang meliputi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum di Desa dan/atau Kelurahan, pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN), dan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya yang belum dapat di laksanakan pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan.

### 1.1 Aspek Strategis & Permasalahan Utama

1. Jumlah staf yang kurang memadai baik dari sisi kualitas masih cukup rendah maupun sisi kuantitasnya yang semakin terbatas
2. Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang kurang memadai dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di Kecamatan;
3. Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan;
4. Beragamnya tuntutan dan aspirasi masyarakat dengan berbagai kepentingan kadang-kadang menimbulkan pertentangan. Untuk itu segala aspirasi tersebut ditampung dan diperhatikan;
5. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas
6. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran Kecamatan harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat;
7. Semakin dinamisnya tingkat pendidikan dan sosial ekonomi berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat; dan
8. Pemberian pelayanan kepada masyarakat secara optimal/maksimal tanpa komplain sebagai instansi pembina penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan.

### 1.4 Landasan Hukum

LKIP Kabupaten Wonogiri ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 06 Tahun 2021 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 – 2026;

3. Peraturan Bupati Kabupaten Wonogiri Nomor 65 tahun 2019 tentang penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri;
4. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 65 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 – 2026;
5. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 124 Tahun 2021, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan
6. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 45 Tahun 2022, tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
7. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan pemerintah Kabupaten Wonogiri tahun 2023

## **1.5 Sistematika**

Sistematika penulisan LKjIP Kecamatan Baturetno Tahun 2022 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada Bab ini menyajikan gambaran umum yang melatar belakangi dasar penyusunan LKjIP, Tugas dan Fungsi serta struktur organisasi Perangkat Daerah, Aspek Strategis dan Isu Strategis yang dihadapi didalam pelaksanaan pembangunan, dasar hukum dan sistematika penulisan.

### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Pada Bab ini menyajikan uraian ringkasan/ikhtiar Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Pada Bab ini menyajikan :

1. membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu;
3. membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis;
4. membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau

peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;

6. analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

#### **BAB IV PENUTUP**

Pada Bab ini menyajikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya

#### **LAMPIRAN**

Perjanjian Kinerja

Rencana Aksi

RKT

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Permendagri 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

#### 2.1. Rencana Strategis

Rencana Strategis Kecamatan Baturetno Kabupaten Wonogiri adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Kecamatan Baturetno Kabupaten Wonogiri. Rencana Strategis Kecamatan Baturetno Kabupaten Wonogiri yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 ( lima ) tahun yaitu dari tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 65 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten wonogiri Tahun 2021 – 2026.

Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Bupati Wonogiri terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Kecamatan Baturetno Kabupaten Wonogiri dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Kecamatan Baturetno Kabupaten Wonogiri tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonogiri Tahun 2016-2021.

Penyusunan Renstra Kecamatan Baturetno Kabupaten Wonogiri telah melalui tahapan – tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Wonogiri Tahun 2016-2021 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Kecamatan Baturetno Kabupaten Wonogiri merupakan hasil kesepakatan bersama antara Kecamatan Baturetno Kabupaten Wonogiri dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Kecamatan Baturetno Kabupaten Wonogiri tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Baturetno

Kabupaten Wonogiri yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Kecamatan Baturetno Kabupaten Wonogiri dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

### **2.1.1 Visi**

Visi pembangunan Kabupaten Wonogiri tahun 2021-2026 merupakan keberlanjutan dari implementasi visi Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri periode tahun 2016-2021. Capaian selama 5 (lima) tahun berdasarkan urusan pemerintahan konkuren, unsur pendukung urusan pemerintahan, unsur penunjang urusan pemerintahan, unsur pengawasan urusan pemerintahan, unsur kewilayahan dan urusan pemerintahan umum serta disinkronisasikan dengan capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), menjadi pertimbangan penting dalam penetapan **Visi Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 – 2026** yaitu

**“Mewujudkan Wonogiri Yang Maju, Mandiri dan Sejahtera”  
dengan semangat Go Nyawiji Sesarengan Mbangun Wonogiri.**

Visi tersebut secara terperinci dapat dijelaskan sebagai berikut

#### **Wonogiri yang Maju.**

Membangun Masyarakat Wonogiri yang Maju adalah mewujudkan masyarakat yang mempunyai kualitas hidup yang tinggi meliputi bidang kesehatan, bidang pendidikan dan sarana prasarana pemerintahan sebagai wujud pelayanan kepada masyarakat. Membangun Masyarakat yang maju diimplementasikan dengan pembangunan sumberdaya manusia berkualitas, pertumbuhan ekonomi, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta inovasi daerah, serta pengembangan infrastruktur wilayah yang maju

#### **Wonogiri yang Mandiri.**

Masyarakat Wonogiri yang Mandiri merupakan tujuan agar masyarakat mampu memenuhi segala kebutuhan dasarnya secara mandiri dan cukup. Dengan begitu, mandiri menjadi sebuah metode untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan hidupnya berbasis sumberdaya lokal, baik modal pokok milik sendiri, baik sumberdaya alam, sumber daya, manusia, sosial, budaya, ekonomi, politik. Kemandirian wonogiri didukung oleh kemampuan memanfaatkan potensi dan peluang eksternal sebagai pendorong pembangunan wilayah.

## **Wonogiri yang Sejahtera.**

Masyarakat Wonogiri yang Sejahtera adalah masyarakat yang tercukupi segala kebutuhan dasarnya (*basic need*) secara adil dan merata berprinsip pada peri kemanusiaan dan peri keadilan. Masyarakat sejahtera ditandai dengan penciptaan lapangan pekerjaan dan peningkatan pendapatan masyarakat, juga terbebas dari ketidakmerdekaan, kebodohan, kesakitan, kelaparan, serta ancaman dari perlakuan atau tindak kekerasan fisik maupun non fisik. Dalam lingkungan masyarakat yang sejahtera akan tercipta hubungan sosial yang nyaman dan aman, tanpa adanya diskriminasi SARA, serta tercipta relasi yang dinamis, saling menghargai, saling pengertian, dan toleransi yang tinggi.

Ketercukupan kebutuhan masyarakat juga didukung dengan pemenuhan prasarana dan sarana dasar meliputi sandang, pangan dan papan, pelayanan publik, ruang publik, transportasi, serta teknologi yang harus disediakan secara cukup dan menerus, untuk mencapai kemajuan dan perkembangan kehidupan masyarakat yang lebih baik dan sejahtera.

## **GO NYAWIJI SESARENGAN MBANGUN WONOGIRI.**

Go Nyawiji Sesarengan mBangun Wonogiri adalah ajakan kebersamaan yang dilandasi semangat gotong royong untuk mewujudkan WONOGIRI SUKSES.

1. **“Go”** yang diartikan sebagai sebuah ajakan kepada seluruh elemen pemerintahan baik legislatif, eksekutif dan yudikatif beserta masyarakat wonogiri untuk bersama-sama bersinergi mewujudkan Wonogiri yang maju, mandiri dan sejahtera dengan tetap terjaga rasa persatuan dan kesatuan.
2. **“Nyawiji”** yang diartikan sebagai kebersamaan seluruh elemen masyarakat wonogiri tanpa memandang suku, agama dan ras untuk bersama-sama menjadi satu tekad dalam rangka mewujudkan cita-cita lima tahun kedepan.
3. **“Sesarengan”** yang diartikan sebagai keikutsertaan seluruh masyarakat wonogiri dalam pengambilan keputusan yang menyangkut hajat hidup mereka sekaligus menjadikan masyarakat sebagai subyek dan sasaran dalam pembangunan.
4. **“Mbangun Wonogiri”** yang diartikan sebagai tujuan akhir mewujudkan Wonogiri Sejahtera yang diawali dari ajakan

kebersamaan dengan keikutsertaan seluruh masyarakat Wonogiri untuk membawa Wonogiri yang Sukses.

**Wonogiri SUKSES** adalah kemampuan daerah untuk menjalankan pemerintahan sesuai dengan MANAJEMEN SUKSES yaitu menjaga Stabilitas daerah tetap kondusif, berdasarkan Undang-Undang dalam menjalankan pemerintahan, menjalankan fungsi koordinasi dalam menjalankan tugasnya, menetapkan sasaran yang tepat, melakukan evaluasi secara periodik dan memiliki semangat juang yang tinggi dalam mewujudkan visi dan misi.

### **2.1.2 MISI**

#### **1. Menjadikan rakyat Wonogiri yang lebih pintar, lebih sehat dan lebih berbudaya.**

Misi pertama menjadikan rakyat Wonogiri yang pintar ini bertujuan mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas melalui penguatan dan pemantapan kualitas pendidikan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Sumber daya manusia yang pintar adalah sumber daya yang mampu bersaing dalam era globalisasi yang semakin terbuka, sehingga dituntut kualitas sumberdaya manusia yang mampu bersaing secara kompetitif dalam kompetensi dan kualifikasi.

Menjadikan rakyat Wonogiri yang lebih sehat bertujuan mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas melalui penguatan dan pemantapan kualitas hidup dengan peningkatan sarana prasarana kesehatan dan kualitas pelayanan kesehatan berbasis ilmu pengetahuan teknologi dan inovasi. Sumber daya manusia yang sehat adalah sumber daya yang mampu bersaing untuk meningkatkan indek pembangunan manusia.

Menjadikan rakyat Wonogiri yang berbudaya adalah upaya membentuk karakter masyarakat Wonogiri yang semakin berbudaya. Di tengah arus keterbukaan informasi, teknologi dan globalisasi yang nyata, kemudian bagaimana masyarakat Wonogiri tetap kuat menjaga etika dan norma serta nilai budaya asli Wonogiri serta menjaga kearifan lokal sejak dini.

## **2.2 Mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Wonogiri.**

Misi kedua ini bertujuan untuk semakin mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi secara optimal di jajaran Pemerintah Kabupaten Wonogiri, yang pada periode sebelumnya telah terbangun ditandai dengan membaiknya tata kelola pemerintahan sesarengan membangun Wonogiri.

Dalam lima tahun kedepan, reformasi birokrasi diharapkan dapat diimplementasikan pada tiga dimensi utama yaitu pelayanan publik yang semakin baik, efektivitas program/kegiatan dan efisiensi anggaran.

Reformasi birokrasi terhadap manajemen pemerintahan, kapasitas kelembagaan dan manajemen sumber daya manusia aparatur diharapkan juga semakin baik yang didukung dengan pemanfaatan ilmu pengetahuan teknologi dan mendorong pengembangan inovasi dalam rangka membangun Wonogiri sebagai Kabupaten Digital.

Pelaksanaan Pelayanan publik yang baik dapat diwujudkan dengan (a) membangun pusat pelayanan secara terpadu satu atap/kantor pemerintahan terpadu yang terintegrasi dengan aktifitas publik dan (b) pemerintahan yang cepat tanggap serta cepat hadir dalam masyarakat. Sedangkan keterbukaan di bidang pemerintahan dapat dilakukan dengan (a) memperkuat keterbukaan informasi publik, transparansi dan partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan. (b) meningkatkan komunikasi dan serapan aspirasi publik.

Efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan tergambar dalam proses perencanaan, penganggaran, serta evaluasi pembangunan yang akuntabel yang fokus pada kinerja dan berorientasi pada hasil (*outcome*).

Agar dapat melaksanakan manajemen pemerintahan yang baik, bersih dan melayani dibutuhkan kelembagaan/organisasi yang tepat dan didukung dengan penataan sistem manajemen sumberdaya manusia aparatur baik yang terimplementasikan dalam bentuk integritas aparatur yang dibangun melalui kompetensi dan etika menuju integritas pribadi dan institusi serta mendorong birokrasi yang inovatif.

### **2.3 Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran.**

Misi ketiga ini adalah untuk mengarahkan kebijakan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Wonogiri dalam rangka menurunkan angka pengangguran dan jumlah penduduk miskin, yang didukung oleh perekonomian daerah yang stabil, berkualitas, inklusif, dan menyebar sampai ke desa.

Program pengentasan kemiskinan difokuskan kepada kelompok sasaran utama, seperti petani, pelaku Usaha Kecil Mikro serta pekerja dan kelompok rentan lainnya.

Program pengentasan kemiskinan tersebut perlu didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang tersebar sampai di seluruh wilayah desa, memperhitungkan kelestarian lingkungan dan keberlangsungan ketersediaan sumber daya, melibatkan seluruh kelompok masyarakat dengan mengutamakan peran dan kontribusi kelompok masyarakat yang kurang beruntung, dan menghapus praktek ekonomi biaya tinggi.

Program pengentasan kemiskinan ke depan juga diarahkan untuk fokus pada pendidikan dan kesehatan terutama bagi rumah tangga miskin, serta masyarakat terlantar melalui penyediaan data BDT yang telah terverifikasi dan tervalidasi dengan sebaran pada desa/ kelurahan miskin di Kabupaten Wonogiri.

Perluasan lapangan pekerjaan juga menjadi penting bukan hanya untuk mengatasi pengangguran, namun juga bagaimana meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan menciptakan pengusaha-pengusaha baru (*startup*) di Kabupaten Wonogiri.

### **4. Membangun pemenuhan sarana dan prasarana dasar di Wonogiri yang berkualitas dan berwawasan lingkungan guna menunjang pengembangan wilayah.**

Misi keempat ini bertujuan melanjutkan pembangunan sarana prasarana infrastruktur jalan dan jembatan yang menyambungkan wilayah terluar Wonogiri semakin mantap

dengan tetap menjaga *alus dalane*.

Pembangunan infrastruktur ini menjadi semakin penting untuk menyambungkan antar kecamatan, antar desa/ kelurahan dalam rangka mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi.

Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan perlu didukung dengan sarana keselamatan jalan yang memadai agar tercipta rasa aman, tenang dan selamat.

Dalam lima tahun ke depan sarana prasarana dasar yang masih perlu ditingkatkan adalah penyediaan air baku dan air bersih untuk solusi penanganan kekeringan yang semakin permanen.

Berdasarkan penjabaran atas Misi Kepala Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021-2026, Kecamatan Baturetno bertanggung jawab untuk mewujudkan visi dengan mendukung misi Kepala Daerah, dukungan visi dan misi kepala daerah dalam lingkup tugas fungsi dan kewenangan yang menjadi tanggungjawab Kecamatan Baturetno sebagai berikut :

1. Memaksimalkan pelayanan perijinan sesuai kewenangan kecamatan;
2. Memaksimalkan pengelolaan arsip;
3. Meningkatkan validitas data administrasi kependudukan;
4. Meningkatkan akses penyerapan informasi pertanahan kepada masyarakat;
5. Meningkatkan SDM aparatur pemerintah kecamatan;
6. Bersama TNI/POLRI, meningkatkan pembinaan pemberdayaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
7. Bersama Puskesmas meningkatkan pembinaan pemberdayaan kesehatan dan posyandu;
8. Menjaga iklim kondusif dan toleransi antar umat beragama;
9. Menjaga dan mengembangkan adat budaya dan tradisi lokal.

### **2.1.3 Tujuan dan Sasaran**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu

yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kecamatan Baturetno Tahun 2016-2021 sebanyak 3 ( tiga ) sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Kecamatan Baturetno Kabupaten Wonogiri sebagai berikut :

**Tabel 2.1.3**

**Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja**

**Kecamatan Baturetno Kabupaten Wonogiri**

N O	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Mewujudkan tata kelola Pemerintah Kecamatan yang baik		Nilai Kematangan Organisasi Kecamatan Baturetno	30	30	31	32	33	34
2	terwujudnya birokrasi yang bersih,akuntabel, kapabel dan pelayanan publik yang prima	Meningkatnya kinerja Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	70,5	71,5	72,5	73,5	74,5	74,5
			Indeks Profesionalitas ASN Kecamatan	70	75	81	81,5	82	82
			Jumlah ASN Kecamatan yang menjadi Agen Perubahan	1	1	2	3	4	5
			Jumlah inovasi Kecamatan	1	1	1	1	1	1
			IKM (Indek Kepuasan Masyarakat) Kecamatan	83	83	83	83	83	83

## 2.2. Perencanaan Kinerja

Tahun 2023 merupakan periode ketiga dari pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Tahun 2021-2026. Sesuai dengan Rencana Strategis yang telah disusun, terdapat 1 (satu) Tujuan dengan 1 (satu) sasaran dan 5 (lima) indikator kinerja.

Pada Renja Kecamatan Baturetno, tujuan OPD adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan indikator nilai kematangan organisasi perangkat daerah diharapkan memenuhi target sebesar Angka 31.

Sasaran di Kecamatan Baturetno pada Renja terdapat 5 Indikator yaitu :

1. Nilai SAKIP Kecamatan

Indikator ini pada tahun 2023 target yang akan dicapai sebesar 72,5. Nilai ini didapat dari penilaian Evaluasi LKjIP dan SAKIP oleh Inspektorat.

2. Indeks Profesionalitas ASN Kecamatan

Indikator ini pada tahun 2023 target yang akan dicapai sebesar 81. Nilai ini didapat dari Rekap Nilai ASN yang penilaiannya beberapa aspek seperti Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin.

3. Jumlah ASN Kecamatan yang menjadi Agen Perubahan

Indikator ini pada tahun 2023 target yang akan dicapai sebesar 2 orang dinyatakan dengan SK Kepala OPD sebagai Agen Perubahan.

4. Jumlah Inovasi Kecamatan

Indikator ini pada tahun 2023 target yang akan dicapai sebanyak 1 Inovasi.

5. IKM Kecamatan

Indikator ini pada tahun 2023 target yang akan dicapai sebesar 83 Angka. Nilai IKM didapat melalui Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Pengguna Pelayanan Publik Kecamatan Baturetno.

Adapun Tujuan sasaran dan program yang telah ditetapkan renstra pada Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1.4 Tujuan Sasaran Tahun 2023

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan Kecamatan yang baik			Nilai kematangan organisasi Kecamatan	angka	31
		1.1	Meningkatnya kinerja Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	angka	72,5
				Indeks Profesionalitas ASN Kecamatan	angka	81
				Jumlah ASN Kecamatan yang menjadi Agen Perubahan	angka	2
				Jumlah inovasi Kecamatan	angka	1
				IKM Kecamatan	angka	83

### 2.3. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Baturetno Kabupaten Wonogiri Tahun 2022 mengacu pada dokumen Renstra Kecamatan Baturetno Kabupaten Wonogiri Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023, dan dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023, Kecamatan Baturetno Kabupaten Wonogiri telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Kecamatan Baturetno

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Mewujudkan tata kelola pemerintah Kecamatan yang baik	Nilai Kematangan Organisasi Kecamatan	31
1.1	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	72,5
		Indeks Profesionalitas Kecamatan	81
		Jumlah ASN Kecamatan yang menjadi Agen Perubahan	2
		Jumlah Inovasi Kecamatan	1
		IKM Kecamatan	83
1	POGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum	100 Persen
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100 Persen
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase tertib administrasi pemerintahan kecamatan dan fungsi koordinasi	100 Persen
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik	100 Persen

Program	Anggaran	Keterangan
POGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 2.038.765.367	APBD
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp. 5.994.500	APBD
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp. 43.990.900	APBD
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp. 75.668.180	APBD

Kecamatan Baturetno telah melaksanakan 3 kali perubahan Perjanjian Kinerja, yaitu Perjanjian Kinerja Penetapan, Perjanjian Kinerja Perubahan-Mendahului Perubahan, dan Perjanjian Kinerja Perubahan. Perubahan ini hanya terletak pada Anggaran.

Perjanjian Kinerja Kecamatan Baturetno Tahun 2023 secara lengkap dapat dilihat pada lampiran Rencana Strategis

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Baturetno Kabupaten Wonogiri selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Baturetno Kabupaten Wonogiri yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2023 Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kecamatan Baturetno.

#### **Kerangka Pengukuran Kinerja**

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

### 3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Skala nilai peringkat kinerja adalah sebagai berikut :

- a. Sangat Baik :  $\geq 91\%$ ;
- b. Baik : 76 – 90,99%;
- c. Cukup : 66 – 75,99%;
- d. Kurang : 51 – 65,99%;
- e. Sangat Kurang :  $\leq 50,99\%$ .

Rumus :

1. Semakin tinggi realisasi sama dengan pencapaian kinerja semakin baik

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Semakin tinggi realisasi sama dengan pencapaian kinerja semakin buruk

$$\frac{(\text{Realisasi} - (\text{Target} - \text{Realisasi}))}{\text{Target}} \times 100\%$$

### 3.2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Pada bab ini disajikan kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

#### 3.2.

Perbandingan antara target dan realisasi Kinerja tahun ini;

N o	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tar get	Realisa si	Capai an %	Katego ri	Sumb er Data
1	Mewujudkan tata kelola Pemerintah Kecamatan yang baik	Nilai Kematangan Organisasi Kecamatan Baturetno	Angka	31	34	109	Sangat baik	Hasil Verval Bagian Organisasi Setda Kabupaten Wonogiri
2	terwujudnya birokrasi yang bersih,akuntabel, kapabel dan pelayanan publik yang prima							
	Meningkatnya kinerja Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	Angka	72,5	70,46			LHE Sakip dari Inspektorat (Belum dilaksanakan monev)

		Indeks Profesionalitas ASN Kecamatan	Angka	81	74,14	91	Baik	Skoring/ nilai indikator (BKD)
		Jumlah ASN Kecamatan yang menjadi Agen Perubahan	Angka	2	3	150	Sangat baik	Sk camat
		Jumlah inovasi Kecamatan	Angka	1	5	500	Sangat baik	Inovasi sudah masuk pada Gerbang Indah Wonogiri
		IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	Angka	85	85,02	100,02	Sangat baik	Hasil Nilai IKM Kecamatan

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

Pada Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023, Kecamatan Baturetno memiliki 1 (satu) tujuan yaitu **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan yang baik** dengan indikator kinerja Nilai Kematangan Organisasi Kecamatan. Adapun target Nilai Kematangan Organisasi Kecamatan yaitu sebesar 31 dan sudah terealisasi dengan nilai 34, sehingga capaian yang didapat sebesar 109% dan berada pada kategori **Sangat Baik**. Hasil tersebut didapat setelah Bagian Organisasi Setda Kabupaten Wonogiri melaksanakan validasi dan perhitungan tingkat kematangan organisasi pada Kecamatan Baturetno pada bulan Oktober 2022.

Kematangan Perangkat Daerah diukur berdasarkan pencapaian yang dilakukan oleh daerah pada setiap variabel dan indikator. Penilaian tingkat kematangan Perangkat Daerah dan Instansi Pemerintah Daerah menggunakan instrumen pengukuran dengan 11 (sebelas) variabel indikator merupakan bagian dari implementasi Reformasi Birokrasi pada 4 (empat) area perubahan. Area perubahan di bidang akuntabilitas diterjemahkan dalam aspek perencanaan, monitoring dan pengendalian, penjaminan mutu

layanan, analisis kebijakan dan pemecahan masalah, serta pengukuran kinerja. Sedangkan area perubahan di bidang penataan tata laksana diterjemahkan dalam variabel standard operasional prosedur. Area perubahan di bidang penataan sumber daya manusia (SDM) diterjemahkan dalam variabel pendidikan dan pelatihan serta manajemen sumber daya yang terukur. Area perubahan di bidang manajemen perubahan diterjemahkan dalam variabel manajemen risiko, pengembangan inovasi layanan, dan budaya organisasi.

Selain tujuan organisasi terdapat 1 (satu) sasaran strategis yaitu **Meningkatnya Kinerja Kecamatan** yang mempunyai 5 (lima) indikator kinerja yaitu :

1. Nilai SAKIP Kecamatan;
2. Indeks Profesionalitas ASN Kecamatan;
3. Jumlah ASN yang menjadi Agen Perubahan Kecamatan;
4. Jumlah Inovasi Kecamatan;
5. IKM Kecamatan.

Untuk mengukur capaian kinerja pada Sasaran Strategis yang dimaksud maka telah dilakukan analisis kinerja sebagai berikut :

#### 1. Capaian Indikator Nilai SAKIP Kecamatan

Tabel 3.2. 1 Capaian Indikator Nilai SAKIP Kecamatan

Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian%	Keterangan
Nilai SAKIP Kecamatan	angka	71,5	70,46	98,55	LHE Sakip dari Inspektorat (Belum dilaksanakan monev)

Indikator sasaran Nilai SAKIP Kecamatan Baturetno dengan target 72,5 pada tahun 2023 belum terealisasi karena belum dilaksanakan monitoring dan evaluasi dari Inspektorat Kabupaten Wonogiri. Hasil yang tercantum pada realisasi tahun 2023 adalah hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Tahun 2022 dengan hasil rekomendasi sebagai berikut :

1. Memerintahkan kepada seluruh pegawai untuk merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja beserta capaian kerjanya menjadi sebuah dokumen perencanaan kinerja yang diformalkan, kemudian mempublikasikannya di web resmi OPD / Kabupaten dengan tepat waktu.

2. Melakukan sinkronisasi maupun FGD dalam penyusunan dokumen perencanaan kinerja agar dokumen perencanaan kinerja jangka pendek baik indikator maupun target kinerja yang akan dicapai.
3. Mengupayakan secara maksimal untuk memenuhi target kinerja yang telah diperjanjikan.
4. Melakukan pemantauan dan pengukuran kinerja secara berjenjang dan berkelanjutan guna mencapai kinerja yang Efektif dan Efisien dengan mengoptimalkan penggunaan Teknologi Informasi (Aplikasi e-SAKIP).
5. Mempergunakan hasil pengukuran kinerja sebagai salah satu langkah perbaikan atas tindaklanjut rekomendasi untuk pemenuhan capaian kinerja sebagai bentuk kepedulian atas hasil pengukuran kinerja.
6. Menyusun Laporan Kinerja sesuai standar yang memuat target dan realisasi capaian kinerja dan penggunaan anggaran yang telah ditetapkan pada PK seluruh pegawai serta menganalisis dan mengevaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja level nasional sebagai gambaran kualitas atas pencapaian kinerja.
7. Mengoptimalkan Kinerja Tim Pemantauan kegiatan perkembangan pencapaian kinerja untuk dapat mengevaluasi akuntabilitas kinerja internal secara berjenjang dan berkelanjutan.
8. Menindaklanjuti seluruh rekomendasi sebagai langkah perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi tahun 2023 dilaksanakan pada triwulan kedua setelah tahun anggaran yang dinilai selesai. sehingga sampai dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Kecamatan Baturetno Tahun 2023 belum tersedia. sebagai gambaran Kecamatan Baturetno pada tahun sebelumnya mengalami penurunan nilai SAKIP. Kecamatan Baturetno telah berupaya meningkatkan nilai SAKIP dengan melakukan respon cepat dalam menindaklanjuti reuiu SAKIP di tahun sebelumnya. Evaluasi yang dilaksanakan berdasarkan 5 (Lima) Komponen

besar manajemen kinerja yang meliputi : Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja, dan Capain Kinerja.

## 2. Capaian Indikator Indeks Profesionalitas ASN Kecamatan

Tabel 3.2. 2 Capaian Indikator Indeks Profesionalitas ASN Kecamatan

Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian%	Keterangan
Indeks Profesionalitas ASN Kecamatan	Angka	81	74,7	91	MYSapk

Indikator sasaran Indeks Profesionalitas ASN Kecamatan dengan target 81 pada tahun 2023 terealisasi sebesar 74,14 dengan capaian 91% dan berada pada ketegori **Baik**. Hasil tersebut didapat setelah dilakukan pengukuran kepada seluruh pegawai ASN Kecamatan Baturetno dan dapat dilihat tabel dibawah ini.

No	Nama	Nilai	Ket
1	Drs. EKO NUR HARYONO,MM	87	
2	WIDODO, S.IP,M.Si	67,5	
3	AYIRNA SURATNINGSIH, S.IP.M.Si	68	
4	ENDANG PURWANINGSIH, SP.MM	73,5	
5	ARIF WIBISONO, S,SOS	65,5	
6	EMY CHUSNUL CHOTIMAH, SE	91	
7	SURATI, SE	51	
8	GINA SETIYATI	78,7	
9	VITA ARIYANA, S.Md. Kom	91	
10	IMAM MUHSIN	81	
11	PUJIANTO	67,5	
Nilai IPASN		74,7	

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat profesionalitas ASN tidak tercapai, antara lain pejabat struktural masih banyak yang belum mengikuti Diklatpim, Workshop,seminar atau pelatihan 20 Jam Pelajaran beberapa ASN belum tercapai.Hal inilah yang menyebabkan Kecamatan Baturetno tidak bisa memenuhi Indeks Profesionalitas ASN Kecamatan yang telah ditargetkan pada Tahun 2023.

## Capaian Indikator Jumlah ASN yang menjadi Agen Perubahan Kecamatan

Tabel 3.2. 3 Capaian Indikator Jumlah ASN yang menjadi Agen Perubahan Kecamatan

Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian%	Keterangan
Jumlah ASN Kecamatan yang menjadi Agen Perubahan	Angka	2	3	150	Dengan Keputusan Camat Baturetno Nomor 35 Tahun 2023

Indikator sasaran Jumlah ASN Kecamatan yang menjadi Agen Perubahan dengan target 2 orang pada tahun 2023 sudah terealisasi sebesar 3 dengan capaian 150% dan berada pada kategori **Sangat Baik**. Hasil tersebut didapat setelah ditetapkannya Surat Keputusan Camat Baturetno Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Penetapan Agen Perubahan Pada Kantor Kecamatan Baturetno Kabupaten Wonogiri Tahun 2023. Dalam Lampirannya telah ditetapkan Agen Perubahan Pada Kantor Kecamatan Baturetno Tahun 2023 berjumlah 3 (tiga) pegawai ASN yaitu

1. Drs. Eko Nur Haryono,MM.
2. Suyatno, S.IP, MM
3. Mukino, SE

Penunjukan Agen Perubahan Kecamatan berdasarkan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pembangunan Agen Perubahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri. Adapun tugas dari tim Agen Perubahan Kecamatan adalah Mendorong peningkatan kinerja ASN berdasarkan tugas pokok dan fungsi, Mendorong peningkatan kedisiplinan ASN. Hal ini sudah dilakukan dengan terus memberikan arahan kepada ASN untuk meningkatkan kedisiplinan dan memenuhi kinerja yang menjadi tanggung jawab ASN, sehingga yang dihasilkan ASN dapat memenuhi tugas dan tanggung jawabnya seperti pelaporan kinerja tepat waktu, melayani masyarakat dengan baik dan penuh tanggung jawab.

### 3. Capaian Indikator Jumlah Inovasi Kecamatan

Tabel 3.2. 4 Capaian Indikator Jumlah Inovasi Kecamatan

Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian%	Keterangan
Jumlah Inovasi Kecamatan	Angka	1	5	500	Inovasi sudah masuk pada Gerbang Indah Wonogiri

Indikator sasaran Jumlah Inovasi Kecamatan dengan target 1 pada tahun 2022 sudah terealisasi sebesar 5 inovasi dengan capaian 500% dan berada pada kategori **Sangat Baik**. Hasil tersebut didapat dari jumlah inovasi Kecamatan Baturetno, yang mana Kecamatan Baturetno telah membuat sebanyak 5 inovasi yaitu :

1. SIMPATIK BRO ( Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Kecamatan Baturetno) Aplikasi ini Meningkatkan kualitas penyelenggaraan dan pelayanan di Kecamatan Baturetno, dimana masyarakat akan menerima pemberitahuan dari petugas kalau proses pengurusan terkait layanan paten sudah selesai.
2. LENG SEMUT (Kumpul Bareng Bersama KPM Menuju Mbatu yang Bermutu) Kegiatan dan Pertemuan rutin yang dilaksanakan oleh KPM di wilayah kecamatan Baturetno ini bisa mendapatkan laporan data yang akurat sehingga tepat sasaran dalam penanganan permasalahan yang ada didesa.
3. SAMBAT PAK KADES (Sistem Pendampingan Administrasi Desa di Kecamatan Baturetno dan Pelaporan Keuangan APBDes) dimulai dari Pembinaan dan Monev dari Tim Monitoring Kecamatan yang melaksanakan kunjungan langsung ke desa – desa, dalam melaksanakan tugas Tim Monitoring melakukan pengecekan kesesuaian realisasi kegiatan dengan Rencana Anggaran Biaya dan bukti realisasi penggunaan dana. Dalam pengecekan tersebut disediakan Form sebagai bukti pengecekan dan isian untuk rekomendasi hasil monev kegiatan. Penyampaian hasil pelaksanaan oleh Tim monitoring tingkat kecamatan

disahkan dalam Berita Acara dan Akan dilaksanakan Rapat Pleno di Tingkat Kecamatan yang dihadiri oleh Kepala Desa, Sekertaris Desa, Kaur Keuangan Desa, Ketua BPD dan perwakilan tokoh masyarakat dari masing – masing Desa. Dalam Rapat tersebut akan menyajikan laporan pelaksanaan kegiatan dan realisasi penggunaan anggaran kegiatan dalam satu semester dan dilakukan tindak lanjut oleh Kepala Desa dan perangkat Desa.

4. RAWUH, Bagi pegawai non asn mempermudah proses presensi dan bagi admin kepegawaian aplikasi ini mampu merekap presensi otomatis tanpa perlu merekap manual.
5. TATA KENDI (Tata Kelola Pajak Kendaraan Dinas) memudahkan untuk rekapitulasi data dan pelaporan tahunan Pajak Kendaraan Dinas, dimana kita bisa mengetahui kapan waktu mendekati pembayaran pajak kendaraan, dan melaporkan ke BPKD bagian aset.

## 5. Capaian Indikator IKM Kecamatan

Tabel 3.2. 5 Capaian Indikator IKM Kecamatan

Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian%	Keterangan
IKM Kecamatan	Angka	85	85,02	100,02	Hasil Nilai IKM Kecamatan Baturetno

Mengacu pada realisasi indikator IKM Kecamatan tahun 2022 dengan hasil 85,2 maka target Indikator sasaran IKM Kecamatan tahun 2023 adalah 85, dan sudah terealisasi sebesar 85,02 dengan capaian 100,02% dan berada pada ketegori **Sangat Baik**. Dengan adanya survey ini dapat diartikan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan Baturetno yang diberikan telah dilaksanakan dengan baik.

Kecamatan Baturetno melaksanakan evaluasi terhadap kinerja pelayanan publik 2 kali dalam kurun waktu 1 tahun, yaitu di Bulan Juli dan Desember 2023. Dengan pengukuran penilaian sebagai berikut.

Analisis SKM dalam laporan ini berdasarkan dari pengolahan

unsur pelayanan dalam kuesioner survey yang diberikan kepada para pengguna layanan. dimana kualitas pelayanan dan mutu pelayanan yang sudah diterima akan digambarkan dalam bentuk table di bawah.

Tabel 3.2.6  
Nilai SKM Per Unit Pelayanan

No	Unsur Pelayanan	NRR	Mutu Pelayanan	Kualitas Pelayanan
U1	Kesesuaian Persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanan	3.635	A	SANGATBAIK
U2	Kemudahan Prosedur pelayanan	3.849	A	SANGATBAIK
U3	Kecepatan Waktu Penyelesaian Pelayanan	3.885	A	SANGATBAIK
U4	Kedisiplinan petugas dalam memberikan pelayanan	3.807	A	SANGAT BAIK
U5	Kesesuaian produk pelayanan	3.729	A	SANGATBAIK
U6	Kompetensi Petugas	3.740	A	SANGATBAIK
U7	Perilaku pelaksana	3.708	A	SANGATBAIK
U8	Penanganan Pengaduan dan Tindaklanjut Pengaduan Pelayanan	3.672	A	SANGAT BAIK
U9	Kualitas Sarana dan Prasarana	3.651	A	SANGATBAIK

Data dari tabel diatas dapat diketahui bahwa :

1. Unsur yang memiliki nilai terbawah meliputi : Persyaratan Pelayanan,( U1) dan Sarana dan prasarana (U8).
2. Unsur yang memiliki nilai tertinggi meliputi :Kecepatan Pelayanan, (U3) dan prosedur pelayanan (U2).

Secara garis besar indeks survey kepuasan masyarakat yang dilakukan oleh Kecamatan Baturetno dilevel muru pelayan "**BAIK**"

<b>IKM UNIT PELAYANAN :</b>	<b>84,19</b>
-----------------------------	--------------

**Mutu Pelayanan :**

**A (Sangat Baik) : 88,31 - 100,00**

**B (Baik) : 76,61 - 88,30**

**C (Kurang Baik) : 65,00 - 76,60**

D (Tidak Baik) : 25,00 - 64,99

### 3.2.2

**Tabel Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu**

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	2022			2023		
				Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	Mewujudkan tata kelola Pemerintah Kecamatan yang baik	Nilai Kematangan Organisasi Kecamatan Baturetno	Angka	31	34	109	30	32	106,6
2	terwujudnya birokrasi yang bersih, akuntabel, kapabel dan pelayanan publik yang prima								
	Meningkatnya kinerja Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	Angka	71,5	Hasil Belum keluar	-	71,5	70,46	98,5
		Indeks Profesionalitas ASN Kecamatan	Angka	81	74,14	91	75	69	92
		Jumlah ASN Kecamatan yang menjadi Agen Perubahan	Angka	2	3	150	1	3	300
		Jumlah inovasi Kecamatan	Angka	1	5	500	1	3	300
		IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	Angka	83	84,02	105	85	85,02	100,02

Perbandingan Realisasi Kinerja Pada tahun 2023 dan 2022 sebagai berikut indikator kinerja pada nilai SAKIP Kecamatan pada tahun 2022 target 71,5 realisasi 70,46 (98%) sedangkan ditahun 2023 target 72,5 hasil belum keluar. indikator kinerja pada Indeks Profesionalitas ASN Kecamatan pada tahun 2022 target 70 realisasi 69 (98%) sedangkan ditahun 2023 target 81 Realisasi 74,14 (91%).Hasil

Indikator Jumlah ASN Kecamatan yang menjadi Agen Perubahan pada tahun 2022 target 1 realisasi 3 (300%) sedangkan ditahun 2023 target 2 Realisasi (150%). Hasil Indikator Jumlah Inovasi Kecamatan pada tahun 2022 target 1 realisasi 3 (300%) sedangkan ditahun 2023 target 1 Realisasi 5 Inovasi (150%). Hasil IKM (indeks Kepuasan Masyarakat) yaitu pada tahun 2022 target 83 dan tercapai 85,2 (105%) sedangkan pada tahun 2021 Target 85 tercapai 85,5 (102%)

Adapun hal-hal yang mendukung dan menghambat keberhasilan pada setiap indikator tujuan dan sasaran Kecamatan Baturetno adalah sebagai berikut :

**a. Nilai kematangan organisasi Kecamatan.**

Baik pada tahun 2022, dan 2023 Kecamatan Baturetno dapat mencapai dan melebihi persentase 100% dari target yang telah ditetapkan dan berada pada kategori **Sangat Baik**. Hal ini karena Kecamatan Baturetno telah menyusun roadmap dan rencana tindak lanjut untuk memenuhi setiap variabel/instrumen penilaian tingkat kematangan perangkat daerah. Kecamatan Baturetno telah memetakan dan menyiapkan segala bukti data pendukung. Di samping itu Kecamatan Baturetno selalu berkomunikasi aktif dengan Tim Verifikasi Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri melakukan verifikasi dan perbaikan terhadap data pendukung yang sudah disampaikan/diunggah sebelumnya melalui link yang sudah disiapkan oleh Bagian Organisasi guna memudahkan pelaksanaan verifikasi bukti/data dukung kematangan organisasi.

**b. Nilai SAKIP Kecamatan**

pada tahun 2022 belum memenuhi target dari 100% dengan nilai 70,46 (BB) sedangkan pada tahun 2023 belum dilaksanakan monitoring dan evaluasi dari Inspektorat Kabupaten Wonogiri sampai dengan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun, sehingga Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Kecamatan Baturetno tahun 2023 belum tersedia sebagai acuan pengukuran capaian kinerja. Nilai SAKIP Kecamatan Baturetno pada tahun 2022 dengan target nilai 71,5 tercapai dengan nilai 70,46 atau tercapai sebesar 98% dari

target yang ditetapkan dan berada pada kategori **Sangat Baik**.

Penilaian SAKIP yang dilaksanakan berdasarkan 5 (Lima) Komponen besar manajemen kinerja yang meliputi : Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja, dan Capaian Kinerja. Dari 5 (Lima) Komponen besar manajemen kinerja yang dinilai tersebut. Untuk tahun 2023 Kecamatan Baturetno terus berupaya meningkatkan dan melaksanakan perbaikan serta menindak lanjuti komponen hasil evaluasi guna meningkatkan nilai SAKIP dan bisa memenuhi target yang telah ditetapkan.

**c. Indeks Profesionalitas ASN Kecamatan**

Pada tahun 2023 untuk IP ASN Kecamatan Baturetno dengan target nilai 81 terealisasi sebesar 74,14 atau tercapai sebesar 91% dari target yang ditetapkan dan berada pada kategori **Sangat Baik**.

Beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat profesionalitas ASN tidak tercapai, antara lain pejabat struktural masih banyak yang belum mengikuti Diklatpim, Workshop, atau pelatihan 20 Jam Pelajaran beberapa ASN belum tercapai. inilah yang menyebabkan Kecamatan Baturetno tidak memenuhi Indeks Profesionalitas ASN Kecamatan yang telah ditargetkan pada Tahun 2023.

**d. Jumlah ASN yang menjadi Agen Perubahan**

Pada tahun 2023 capaian kinerja telah 150% dan berada pada kategori **Sangat Baik**. Pada tahun 2023 Kecamatan Baturetno sudah memiliki masing-masing 3 (tiga) pegawai ASN yang bertindak sebagai Agen Perubahan seiring berlakunya Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pembangunan Agen Perubahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri. Dengan adanya Agen Perubahan di Kecamatan Baturetno, menandakan Kecamatan Baturetno siap untuk melakukan perubahan dalam pelayanan. Dalam hal ini Agen Perubahan menjadi bukti keseriusan untuk meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas, cepat, mudah, transparan, dan akuntabel.

**e. Jumlah Inovasi Kecamatan**

Pada tahun 2022 Kecamatan Baturetno mulai menginisiasi

sejumlah 5 inovasi, yaitu SIMPATIK BRO ( Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Kecamatan Baturetno),(LENG SEMUT (Kumpul bareng bersama KPM menuju Mbatu yang bermutu) SAMBAT PAK KADES,RAWUH,TATA KENDI (Tata Kelola Pajak Kendaraan Dinas). Dengan ini kategori pada tahun 2021 adalah **Sangat Baik**.

Pada 2023 Kecamatan Baturetno mempunyai target jumlah inovasi yaitu 1 dengan realisasi 5 inovasi atau tercapai sebesar 500% dan berada pada kategori **Sangat Baik**. Hasil tersebut didapat dari jumlah inovasi Kecamatan Baturetno, yang mana Kecamatan Baturetno telah membuat sebanyak 5 inovasi.

**f. IKM Kecamatan**

Pada tahun 2022 dan 2023 untuk IKM Kecamatan memenuhi target yang telah ditetapkan setiap tahunnya. IKM kecamatan Baturetno pada Tahun 2022 dengan target 81 terealisasi 85,2 atau tercapai sebesar 105 dan berada pada kategori **Sangat Baik**. Sedangkan pada tahun 2023 IKM Kecamatan Baturetno dengan target 85 terealisasi 85,02 atau tercapai sebesar 100,02 dan berada pada kategori **Sangat Baik**.

Dengan adanya penilaian dari survey ini dapat diartikan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan Baturetno yang diberikan telah dilaksanakan dengan baik.

Pelaksanaan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa pelayanan publik harus berdasarkan kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu dan kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. Penyelenggara pelayanan publik harus melaksanakan evaluasi secara berkala dan berkelanjutan terhadap kinerja pelaksana di lingkup organisasi perangkat daerah.

Ketercapaian ini didukung oleh beberapa faktor diantaranya :

Adanya komitmen dari pimpinan untuk selalu melaksanakan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, Kemudahan di dalam prosedur pelayanan, kesesuaian persyaratan dengan jenis pelayanannya, dan Akses jaringan sistem yang bias dihandalkan.

Dengan demikian Kecamatan Baturetno berkomitmen akan terus meningkatkan Mutu layanan dengan terus konsisten untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat.

### 3.2.3

**Tabel realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah**

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2023	Target Akhir 2026	% Capaian	Tingkat Kemajuan
1	Mewujudkan tata kelola Pemerintah Kecamatan yang baik	Nilai Kematangan Organisasi Kecamatan Baturetno	Angka	34	34	100	tercapai
2	terwujudnya birokrasi yang bersih, akuntabel, kapabel dan pelayanan publik yang prima						
	Meningkatnya kinerja Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	Angka	Hasil Belum keluar	74,5	-	Akan tercapai
		Indeks Profesionalitas ASN Kecamatan	Angka	74,14	82	90,41	Akan tercapai
		Jumlah ASN	Angka	3	5	60	Akan

		Kecamatan yang menjadi Agen Perubahan					tercapai
		Jumlah inovasi Kecamatan	Angka	5	1	300	Sudah melebihi target RPJMD
		IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	Angka	85,02	83	97,62	Akan tercapai

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa :

- a. Realisasi indikator kinerja Nilai Kematangan Organisasi pada tahun 2022 untuk Kecamatan Baturetno adalah 34, sedangkan target akhir 2026 adalah 34 dengan capaian sebesar 100% dan sudah memenuhi RPJMD.
- b. Realisasi indikator kinerja Nilai SAKIP pada tahun 2023 untuk Kecamatan Baturetno adalah 0, sedangkan target akhir 2026 adalah 74,5 dengan capaian sebesar 0% dan berada pada tingkat kemajuan akan tercapai. Hal ini dikarenakan belum dilaksanakan monitoring dan evaluasi dari Inspektorat Kabupaten Wonogiri, sehingga Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Kecamatan Baturetno tahun 2022 belum tersedia sebagai acuan pengukuran capaian kinerja.
- c. Realisasi indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN Kecamatan pada tahun 2022 untuk Kecamatan Baturetno adalah 74,14, sedangkan target akhir 2026 adalah 82 dengan capaian sebesar 90,41% dan berada pada tingkat kemajuan akan tercapai.
- d. Realisasi indikator kinerja Jumlah ASN yang menjadi Agen perubahan Kecamatan pada tahun 2023 untuk Kecamatan Baturetno adalah 3, sedangkan target akhir 2026 adalah 5 dengan capaian sebesar 60% dan berada pada tingkat kemajuan akan tercapai.
- e. Realisasi indikator kinerja Jumlah Inovasi Kecamatan pada tahun 2023 untuk Kecamatan Baturetno adalah 5, sedangkan target akhir 2026 adalah 1 dengan capaian sebesar 500% dan

berada pada tingkat kemajuan sangat baik melebihi target RPJMD.

- f. Realisasi indikator kinerja IKM Kecamatan pada tahun 2023 untuk Kecamatan Baturetno adalah 85,02 sedangkan target akhir 2026 adalah 83 dengan capaian sebesar 97,62% dan berada pada tingkat kemajuan akan tercapai

### 3.2.4

Tabel realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional/Provinsi/Kab (jika ada)

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2023 Kecamatan Baturetno	Standar kabupaten	% Capaian
1	Mewujudkan tata kelola Pemerintah Kecamatan yang baik	Nilai Kematangan Organisasi Kecamatan Baturetno	Angka	31	38,49	80,54
2	terwujudnya birokrasi yang bersih, akuntabel, kapabel dan pelayanan publik yang prima					
	Meningkatnya kinerja Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	Angka	70,46	75,72	95,05
		Indeks Profesionalitas ASN Kecamatan	Angka	69	66,70	103,44
		Jumlah ASN Kecamatan yang menjadi Agen Perubahan	Angka	3	n/a	0
		Jumlah inovasi Kecamatan	Angka	3	n/a	0
		IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	85,02	85,29	99,68

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa :

- a. Realisasi indikator kinerja Nilai Kematangan Organisasi pada tahun 2023 untuk Kecamatan Baturetno adalah 31, sedangkan capaian tingkat Kabupaet sebesar 38,48 dengan

capaian sebesar 80,54%.

- b. Realisasi indikator kinerja Nilai SAKIP pada tahun 2023 perbandinganya mengambil dari nilai sakip tahun 2022 Kecamatan Baturetno sebesar 70,46, sedangkan untuk tingkat Kabupaten sebesar 75,72 dengan capaian sebesar 95,05%.
- c. Realisasi indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN Kecamatan tahun 2023 untuk Kecamatan Baturetno adalah 69 sedangkan di tingkat Kabupaten sebesar 66,70 dengan capaian sebesar 103,44%.
- d. Realisasi indikator kinerja Jumlah ASN yang menjadi Agen perubahan Kecamatan Kecamatan Baturetno tidak bisa dibandingkan dengan tingkat Nasional/Provinsi atau Kabupaten karena dalam Indikator Kinerja Bupati tidak ada Indikator Jumlah ASN Kecamatan yang menjadi Agen Perubahan.
- e. Realisasi indikator kinerja Jumlah Inovasi Kecamatan Baturetno tidak bisa dibandingkan dengan tingkat Nasional/Provinsi atau Kabupaten.dikarenakan tidak ada Inovasi ditingkat Kabupaten semua inovasi ada ditingkat SKPD.
- f. Realisasi indikator kinerja IKM Kecamatan tahun 2023 untuk Kecamatan Baturetno adalah 85,02 sedangkan di tingkat Kabupaten sebesar 85,29 dengan capaian sebesar 99,68

### 3.2.5

**Tabel Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;**

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Mewujudkan tata kelola Pemerintah Kecamatan yang baik	Nilai Kematangan Organisasi Kecamatan Baturetno	Angka	31	34	109	Telah menyusun roadmap dan rencana tindak lanjut untuk memenuhi setiap variabel/instrumen penilaian tingkat kematangan perangkat daerah.	Perlunya data dukung yang relevandalam memenuhi beberapa instrumen kematangan OPD
	Meningkatnya kinerja Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	Angka	72,5	Hasil Belum keluar	-	Belum dilaksanakan monev dari Inspektorat sehingga LHE SAKIP belum tersedia.	Berupaya meningkatkan capaian nilai SAKIP Kecamatan dengan mengumpulkan berkas dan data dukung yang dibutuhkan sebagai bahan penilaian.
		Indeks Profesionalitas ASN Kecamatan	Angka	81	74,14	91	Kurangnya Pelatihan untuk ASN yang menerbitkan sertifikat sehingga bisa	Meningkatkan Kualitas SDM dan mengikuti pelatihan maupun

							untuk menaikkan nilai Profesionalitas ASN Kecamatan, pejabat struktural masih banyak yang belum mengikuti Diklatpim, Workshop, atau pelatihan 20 Jam Pelajaran beberapa ASN belum tercapai	diklat
		Jumlah ASN Kecamatan yang menjadi Agen Perubahan	Angka	2	3	150	Adanya ASN yang dapat dijadikan role model di Lingkungan Kecamatan Baturetno	Membentuk SK ASN Agen Perubahan
		Jumlah inovasi Kecamatan	Angka	1	5	500	Adanya kewajiban membuat inovasi di masing - masing OPD	Membentuk Tim Inovator untuk menciptakan terobosan dan inovasi-inovasi untuk Kecamatan Baturetno. Meningkatkan pembaruan inovasi.
		IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	85	85,02	100,02	Adanya kemudahan dari aplikasi dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri	Adanya komitmen dari pimpinan untuk selalu melaksanakan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

## 6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

### Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Kinerja KECAMATAN BATURETNO

Periode 2022 - 2026

Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator		Satuan	Kinerja			Keuangan				
					Target	Realisasi	(%)	Program	Pagu	Realisasi	%	
1	Meningkatnya kinerja Kecamatan	1.1	Nilai SAKIP Kecamatan	Angka	71,50		-	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.038.795.367	1.658.252.686	81,33
		1.2	Indeks Profesionalitas ASN Kecamatan	Angka	81	74,14	91	2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	5.994.500	5.893.500	98,32
		1.3	Jumlah ASN Kecamatan yang menjadi Agen Perubahan	Angka	2	3	150	3	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	43.990.900	43.323.000	98,48
		1.4	Jumlah inovasi Kecamatan	Angka	1	5	500	4	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	75.668.180	75.403.520	99,65
		1.5	IKM Kecamatan	Angka	82	85,02	100,02					
		<b>RATA-RATA CAPAIAN DARI 5 INDIKATOR</b>							<b>210,255</b>	<b>TOTAL PER SASARAN</b>		<b>2.164.448.947</b>
								<b>TOTAL KESELURUHAN</b>	<b>2.164.448.947</b>	<b>1.782.872.706</b>	<b>82,37</b>	
<b>Tingkat Efisiensi : 127,88</b>												
<b>Tingkat Efektifitas : 255,25</b>												

Tabel 3.2. 6 Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Kecamatan Baturetno

Dalam pelaksanaan kegiatan Kecamatan Baturetno dituntut seoptimal mungkin dapat memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya baik berupa anggaran, sarana prasarana penunjang maupun sumber daya manusianya dan diharapkan dapat melakukan efisiensi sebaik mungkin dalam penggunaan anggaran dan sumber daya yang ada.

Dari tabel diatas dapat di ketahui tingkat efisiensi dan tingkat efektifitas sebagai berikut :

1. Tingkat Efisiensi

Rumus tingkat efisiensi = *Persentase capaian per sasaran - Persentase serapan anggaran per sasaran*

$$\textbf{Tingkat Efisiensi} = 210,5 - 82,37 = 128,13$$

2. Tingkat Efektifitas

Rumus tingkat efisiensi = *Persentase capaian per sasaran - Persentase serapan anggaran per sasaran*

$$\textbf{Tingkat Efektifitas} = (210,5 / 82,37 ) \times 100 = 255,55$$

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tingkat efisiensi kinerja Kecamatan Baturetno sebesar **127,88**, sedangkan tingkat efektifitas kinerja Kecamatan Baturetno sebesar **255,25**.

## 3.2.6

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak menunjang
	Mewujudkan tata kelola Pemerintah Kecamatan yang baik	Nilai Kematangan Organisasi Kecamatan Baturetno	Angka	109	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	109	109	Menunjang
	terwujudnya birokrasi yang bersih,akuntabel, kapabel dan pelayanan publik yang prima				Perencanaan,penanggara n,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	102,33	102,33	Menunjang
	Meningkatnya kinerja Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	Angka	-	Aministrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	100	Menunjang
		Indeks Profesionalitas ASN Kecamatan	Angka	98	Administrasi Kepegwaian Perangkat Daerah	100	100	Menunjang
		Jumlah ASN Kecamatan yang menjadi Agen Perubahan	Angka	300	Administrasi Umum Perangkat Daerah	180,2	180,2	Menunjang
		Jumlah inovasi Kecamatan	Angka	500	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	66	66	Tidak menunjang
		IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	100.02	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100,7	100,7	Menunjang
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	115	115	Menunjang

					Daerah			
					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100	100	menunjang
					Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100	100	menunjang
					PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100	100	menunjang
					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah	100	100	Menunjang
					PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100	100	menunjang
					Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100	100	Menunjang
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat	100	100	Menunjang
					Penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100	100	Menunjang

### 3.3. REALISASI ANGGARAN

Menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja.

#### 3.3.1

#### Capaian Anggaran Program dan Kegiatan Kecamatan Baturetno

No	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>2.038.795.367</b>	<b>1.658.252.686</b>	<b>81,33</b>
	Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.997.500.00	16.950.000.00	99.72
	Aministrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.822.952.599.00	1.457.766.809.00	79.97
	Administrasi Kepegwaian Perangkat Daerah	499.500.00	472.500.00	94.59
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	67.984.568.00	57.616.750.00	84.75
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.969.500.00	4.939.500.00	99.4
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	101.891.700.00	98.360.127.00	96.53
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	23.500.000.00	22.147.000.00	94.24
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>5.994.500.00</b>	<b>5.893.500.00</b>	<b>98,31</b>
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	5.994.500.00	5.893.500.00	98.32
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>49.990.900.00</b>	<b>43.323.000.00</b>	<b>98,48</b>
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah	49.990.900.00	43.323.000.00	98.48
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>75.668.180</b>	<b>75.403.520</b>	<b>99,65</b>
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	49.999.660.00	49.800.000.00	99.6
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat	11.499.000.00	11.434.000.00	99.43
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	14.169.520.00	14.169.520.00	100
	<b>Total</b>	<b>1.782.872.706</b>	<b>1.782.872.706</b>	<b>82,37</b>

Pada Tahun 2023 total anggaran Kecamatan Baturetno sebesar Rp 2.164.418.947,- yang ditujukan untuk mendukung 4 (empat) program, 12 (dua belas) kegiatan dengan 24 (dua puluh empat) sub kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp 1.782.872.706,- dengan capaian kinerja keuangan sebesar 82,34%. Dikarenakan rendahnya serapan pada kegiatan rutin Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN pada tahun 2023 terdapat pegawai yang pensiun 4 ASN.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. KESIMPULAN**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Baturetno Kabupaten Wonogiri Tahun 2023 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Kecamatan Baturetno Kabupaten Wonogiri Tahun 2023. Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Kecamatan Baturetno Kabupaten Wonogiri Tahun 2023 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Baturetno Kabupaten Wonogiri dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Pada tahun 2023 Kecamatan Baturetno Kabupaten Wonogiri menetapkan sebanyak 1 tujuan, 1 sasaran dengan 5 indikator kinerja sesuai dengan Rencana Strategis 2021 - 2026 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ingin dicapai. Secara umum Kecamatan Baturetno sudah mencapai 4 sasaran dengan minimal capaian 100%, tetapi yang menjadi perhatian adalah sasaran di Indeks Profesional ASN yang belum sesuai target. Diharapkan pada tahun yang akan datang pada sasaran tersebut bisa naik menjadi sesuai target/lebih dari target.

Dalam Tahun Anggaran 2023 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Baturetno Kabupaten Wonogiri dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 2.164.418.947,- sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.782.872.706,-, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2023 Kecamatan Baturetno Kabupaten Wonogiri kondisi anggaran adalah Silpa Rp. 381.546.241,- dengan Kategori **“BAIK”**.

#### 4.1. REKOMENDASI

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Kecamatan Baturetno Kabupaten Wonogiri dimasa mendatang antara lain :

1. Perlu perbaikan perencanaan, agar program dan kegiatan diorientasikan untuk mencapai target yang telah ditetapkan.
2. Meningkatkan pemahaman pada semua perangkat untuk mengimplementasikan manajemen kinerja secara baik dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
3. Peningkatan kualitas SDM sesuai tugas pokok dan fungsi yang ada pada Peraturan Bupati Nomor 124 Tahun 2021 tentang Organisasi Tata Kerja Kecamatan sehingga pada SKPD tidak ada rangkap jabatan dan sebagainya

Kabupaten Wonogiri, 30 Januari 2024



# LAMPIRAN



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. EKO NUR HARYONO, MM

Jabatan : Camat Baturetno

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : JOKO SUTOPO

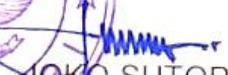
Jabatan : Bupati Wonogiri

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonogiri, 2 Januari 2023

Pihak Kedua,  
  
JOKO SUTOPO

Pihak Pertama,  
  
Drs. EKO NUR HARYONO, MM

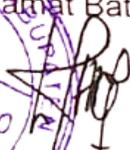
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
KECAMATAN BATURETNO

No (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan Baturetno	72,5 Angka
		Indeks Profesionalitas Kecamatan Baturetno	81 Angka
		Jumlah ASN Kecamatan yang menjadi Agen Perubahan	2 Angka
		Jumlah Inovasi Kecamatan Baturetno	1 Angka
		IKM Kecamatan baturetno	85 Angka

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.004.765.367,-	APBD
2. Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Rp. 75.668.180,-	APBD
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 5.994.500,-	APBD
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 28.990.900,-	APBD

Wonogiri, 2 Januari 2023

  
 Bupati Wonogiri,  
  
 JOKO SUTOPO

  
 Camat Baturetno,  
  
 Drs. EKO NUR HARYONO, MM



## PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. EKO NUR HARYONO, MM

Jabatan : Camat Baturetno

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : JOKO SUTOPO

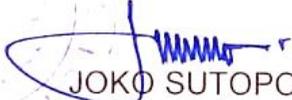
Jabatan : Bupati Wonogiri

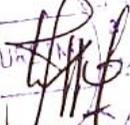
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonogiri, 13 Oktober 2023

Pihak Kedua,  
  
JOKO SUTOPO

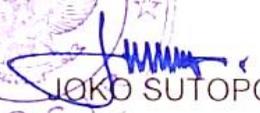
Pihak Pertama,  
  
Drs. EKO NUR HARYONO, MM

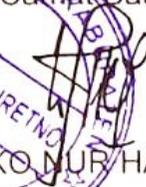
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023  
KECAMATAN BATURETNO

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan Baturetno	72,5 Angka
		Indeks Profesionalitas Kecamatan Baturetno	81 Angka
		Jumlah ASN Kecamatan yang menjadi Agen Perubahan	2 Angka
		Jumlah Inovasi Kecamatan Baturetno	1 Angka
		IKM Kecamatan baturetno	85 Angka

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.038.765.367,-	APBD
2. Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Rp. 75.668.180,-	APBD
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 5.994.500,-	APBD
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 43.990.900,-	APBD

Wonogiri, 13 Oktober 2023

  
 Bupati Wonogiri,  
  
 JOKO SUTOPO

  
 Camat Baturetno,  
  
 Drs. EKO NUR HARYONO, MM